



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TOHA TUSIHADI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 168908

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.255.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3.645 m2/200 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 496.000.000
2. Tanah Seluas 1.780 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 91.000.000
3. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 68.000.000
4. Tanah Seluas 271 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 65.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 353.000.000
6. Tanah Seluas 243 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 182.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 6.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 189.693.363

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 1.450.693.363

**III. HUTANG**

Rp. 436.973.652

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.013.719.711



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.